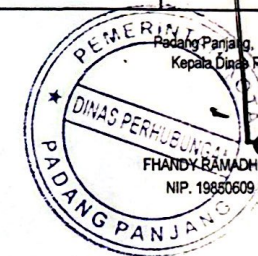


POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

MANDAT ATAS TUGAS DAN FUNGSI /PERMASALAHAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	CROSSCUTTING	
					OPD	INDIKATOR KINERJA
Transportasi Darat	1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur Perhubungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keandalan layanan infrastruktur publik.	Skor rata-rata dari indikator turunan (jalan, transportasi, parkir, perlengkapan jalan) yang dinormalisasi (0-100)	Bagian Organisasi	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan
	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Kota	Mengukur tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	$IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan} + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan})$ $IK1 (\text{Angkutan Jalan}) = (\text{Jumlah trayek yang dilayani dikali bobot trayek}) \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan trayek})$ $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas} \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan})$ Bobot Trayek atau lintas : a)Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot=1 b)Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0,8 c)Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot=0,5 Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1.Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30); 2.Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50); 3.Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70); 4.Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)	Bagian Hukum ORGANDA	-Jumlah Jaringan Trayek -Jumlah Trayek Terlayani
		Kinerja Lalu Lintas Kota	Tingkat kelancaran arus lalu lintas di jalan perkotaan.	$DS = V/C$ DS = Derajat Kejenuhan V = volume lalu lintas (kendaraan per jam) C = kapasitas jalan (kendaraan per jam). Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenuh).		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi	Skor evaluasi dari Inspektorat (A, BB, B, CC, C, D).	Bagian Organisasi - Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

MANDAT ATAS TUGAS DAN FUNGSI /PERMASALAHAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	CROSSCUTTING	
					OPD	INDIKATOR KINERJA
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	penyebrangan di wilayah kewenangan	Jumlah Lokasi Parkir Produktif dibagi Total Lokasi Parkir yang tersedia		
		Konektivitas Darat				
	Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ/Kab/Kota	Jumlah Dokumen RIJ				
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ				
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
	Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Berkualitas	Jumlah titik parkir	kabupaten/kota.	Jumlah Titik Parkir		
	Meningkatnya Perlengkapan Jalan yang berkualitas	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Perbandingan perlengkapan jalan terpasang baik terhadap kebutuhan perlengkapan yang terpasang	Jumlah Perlengkapan berkualitas baik dibagi Jumlah keseluruhan perlengkapan terpasang	Kecamatan	Jumlah usulan perlengkapan jalan
	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan	Jumlah Rambu-rambu	Rambu rambu terpasang			
		Jumlah Warning Light	Warning Light Terpasang			
		Jumlah Traffic Light	Traffic Light Terpasang			
		Jumlah Cermin Tikung	Cermin Tikung Terpasang			
		Jumlah Halte	Bangunan Halte yang tersedia			
		Jumlah Lampu Penerangan Jalan	Penerangan Jalan Umum terpasang			
	Meningkatnya Keselamatan lalu lintas	persentase kecelakaan tahun n	Perbandingan jumlah kecelakaan tahun n terhadap jumlah total aktivitas kendaraan th n	Jumlah kecelakaan th n dibagi jumlah jumlah total aktivitas kendaraan th n dikali 100	Kepolisian	Jumlah Kecelakaan wilayah hukum Kota Padang Panjang
	Meningkatnya kepatuhan terhadap lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan tahun n		Samsat	Jumlah Kendaraan Kota Padang Panjang
		Jumlah pelanggaran lalu lintas	Jumlah pelanggaran tahun n			
	Meningkatnya kualitas SDM ASN urusan perhubungan	Persentase ASN yang bersertifikasi	Perbandingan Jumlah ASN yang bersertifikasi dibanding transportasi terhadap jumlah total ASN	Jumlah ASN bersertifikasi dibagi jumlah total ASN dikali 100	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi bidang transportasi darat
		Persentase ASN dan berkompotensi Teknis	Perbandingan Jumlah ASN yang berkompotensi teknis dibanding transportasi terhadap jumlah total ASN	Jumlah ASN berkompotensi teknis dibagi jumlah total ASN dikali 100	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi teknis bidang transportasi darat
	Meningkatnya keikutsertaan ASN dalam pelatihan dan diklat LLAJ	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikasi LLAJ bidang transportasi	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikasi LLAJ bidang transportasi			
		Jumlah ASN yang memiliki Kompetensi Teknis LLAJ Bidang Transportasi	Jumlah ASN yang memiliki Kompetensi Teknis LLAJ Bidang Transportasi			
	Meningkatnya pelayanan pengujian Kendaraan bermotor	persentase layanan pengujian kendaraan bermotor	Perbandingan jumlah kendaraan yang keur terhadap jumlah kendaraan wajib keur	Jumlah kendaraan keur tahun n dibagi jumlah kendaraan wajib keur tahun n dikali 100		
	Meningkatnya ketersediaan kepemilikan Kartu Keur pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang wajib Keur/Taman kendaraan	Jumlah kendaraan yang wajib Keur/Taman kendaraan			
		Jumlah kendaraan yang melakukan Keur/uji	Jumlah kendaraan yang melakukan Keur/uji			
	Meningkatnya layanan angkutan kota	persentase layanan angkutan				
	Meningkatnya ketersediaan angkutan kota	Jumlah angkutan kota	Jumlah angkutan kota		ORGANDA	Jumlah kendaraan angkutan kota yang mengurus KP

MANDAT ATAS TUGAS DAN FUNGSI /PERMASALAHAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	CROSSCUTTING	
					OPD	INDIKATOR KINERJA
	Meningkatnya partisipasi masyarakat menggunakan angkutan kota	Jumlah Penumpang angkutan kota	Jumlah Penumpang angkutan kota			
		Jumlah kapasitas penumpang angkutan	Jumlah kapasitas penumpang angkutan			



Padang Panjang, Oktober 2025
Kepala Dinas Perhubungan

FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002